

**PROSES KOLABORASI *STAKEHOLDERS* DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERBASIS DESA WISATA DI PANTAI KARANG JAHE DESA
PUNJULHARJO REMBANG**

Nur Jihan Septiani, Drs. Herbasuki Nurcahyanto, M.T, Drs. Aufarul Marom, M.Si

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**
Jl. Prof H Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Kolaborasi Stakeholders di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi asli desa. Penelitian ini bertujuan untuk proses terbentuknya kolaborasi *stakeholders* dalam pemberdayaan di Desa Wisata Punjulharjo Rembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Proses kolaborasi stakeholders dilihat dari subfenomena pemahaman bersama, komitmen, komunikasi dan dampak sementara sudah dilakukan secara optimal. Subfenomena yang kurang optimal yaitu komunikasi dalam tahapan pengkapasitasan pemberdayaan. Komunikasi yang dilakukan antara BUMDes Punjulharjo, Unit Pengelola Pantai Karang Jahe, Kelompok Sadar Wisata, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih kurang optimal. Komunikasi hanya berjalan efektif di lingkungan internal saja yaitu antara BUMDes dan Unit Pengelola. Faktor pendorong kolaborasi stakeholders di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo adalah kualitas sumber daya stakeholders, keuangan hasil wisata, dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten. Faktor penghambat kolaborasi stakeholders yaitu adanya perbedaan kepentingan antar stakeholders dan masyarakat pasif dalam pemberdayaan. Saran yang dapat diberikan adalah membangun keterbukaan informasi antar stakeholders, membangun partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, merubah cara pandang masyarakat terhadap investor dan pemberdayaan berkelanjutan dari stakeholders pendukung.

Kata kunci: Kolaborasi Stakeholders, Pemberdayaan, Desa Wisata

***COLLABORATION PROCESS IN COMMUNITY EMPOWERMENT BASED ON
TOURISM VILLAGE IN PANTAI KARANG JAHE, PUNJULHARJO REMBANG
VILLAGE***

Nur Jihan Septiani, Drs. Herbasuki Nurcahyanto, M.T, Drs. Aufarul Marom, M.Si

Department of Public Administration

Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

Jl. Prof. H Soedarto, S.H Tembalang Semarang Post Box 1269

Telephone (024) 7465407 Fax (024) 7465405

Page: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

Collaboration of Stakeholders at Karang Jahe Beach, Punjulharjo Village is an effort made to build the community's economy through the utilization of the village's original potential. This research aims at the process of forming stakeholder collaboration in empowerment in the Tourism Village of Punjulharjo Rembang. The research method used is descriptive qualitative. Sources of data in this study were obtained from interviews, observations, and documentation. The technique of selecting informants was carried out using purposive sampling. The collaborative process of stakeholders is seen from the sub-phenomenon of mutual understanding, commitment, communication and temporary impacts that have been carried out optimally. A sub-phenomenon that is less than optimal is communication in the empowerment capacitating stage. Communication between BUMDes Punjulharjo, Karang Jahe Beach Management Unit, Tourism Awareness Group, and Culture and Tourism Office is still not optimal. Communication is only effective in the internal environment, namely between BUMDes and the Management Unit. The driving factor for stakeholder collaboration in Karang Jahe Beach, Punjulharjo Village is the quality of stakeholder resources, tourism finance, and full support from the District Government. The inhibiting factor for stakeholder collaboration is the difference in interests between stakeholders and the passive community in empowerment. Suggestions that can be given are building information transparency among stakeholders, building community participation in empowerment, changing the way people perceive investors and sustainable empowerment of supporting stakeholders.

Keywords: Stakeholders Collaboration, Empowerment, Tourism Village

A. PENDAHULUAN

Pantai Karang Jahe adalah bagian potensi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang. Desa Punjulharjo saat ini merupakan desa wisata, pengelolaan Pantai Karang Jahe awalnya dilakukan oleh masyarakat lokal namun seiring perkembangannya, masyarakat sadar bahwa dibutuhkan peran dari pihak lain yang lebih berkompeten di bidang kepariwisataan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Munculnya kesadaran dalam pengelolaan potensi wisata mendorong terbentuknya kolaborasi stakeholders. Kolaborasi merupakan cara yang efektif dalam mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi asli yang dimiliki seperti di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak baik dari pihak Desa Punjulharjo, Instansi Pemerintah maupun swasta. Berikut disajikan tabel peran masing-masing *stakeholders*

dalam pemberdayaan desa wisata Punjulharjo Rembang :

Tabel 1.1

Peran Masing-Masing Stakeholders

Stakeholders	Peran
Unit Pengelola Pantai Karang Jahe	Penanggung jawab kegiatan di Pantai Karang Jahe
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Fasilitator untuk pihak Pantai Karang Jahe
Dinas Kesehatan	Pelatihan kepada pemilik warung makanan di Pantai Karang Jahe
Dinas Lingkungan Hidup	Penyedia fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan Pantai
Aparat Keamanan	Melakukan pengamanan di hari libur
Forum Kerukunan Umat Beragama	Relawan kegiatan penanaman pohon cemara
Bank	Memberi bantuan dalam bentuk fasilitas di Pantai Karang Jahe
Warga Desa Punjulharjo	Pelaku wisata yang diberdayakan
Dinpermades	Pembinaan Pemerintah Desa
Pemerintah Desa	Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan
BUMDes	Meningkatkan perekonomian masyarakat di Pantai Karang Jahe
Kelompok Sadar Wisata	Memberi kesadaran wisata ke masyarakat

Sumber : Hasil Olahan Data dari berbagai sumber, 2020

Kolaborasi *stakeholders* di Pantai Karang Jahe dilakukan melalui

pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembinaan untuk membangun kemandirian masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan di Desa Wisata Punjulharjo sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 bahwa adanya program desa wisata bertujuan untuk membangun aktivitas perekonomian berbasis pariwisata sehingga dapat memberikan dampak penurunan angka urbanisasi dari desa ke kota selain itu desa wisata yang memanfaatkan potensi alam akan mendorong adanya pelestarian demi keberlanjutan desa wisata tersebut.

Proses kolaborasi stakeholders dalam pemberdayaan di Pantai Karang Jahe dilihat dari beberapa komponen sebagai berikut :

1. Dialog antar-muka dalam kolaborasi terjalin kurang efektif karena terdapat peran yang dominan sehingga dalam pengambilan keputusan belum objektif
2. Kepercayaan belum terbangun dengan baik

3. Komitmen antar *stakeholders* sudah baik dilihat dari berbagai keberhasilan Desa Punjulharjo sebagai desa wisata
4. Pemahaman Bersama belum efektif karena terdapat perbedaan kepentingan yang tidak terselesaikan
5. Dampak sementara Punjulharjo sudah cukup baik.

Permasalahan yang diuraikan menimbulkan ketertarikan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana proses terbentuknya kolaborasi *stakeholders* dan faktor pendorong serta faktor penghambat kolaborasi stakeholders dalam pemberdayaan berbasis desa wisata di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang.

B. Kajian Teori

2.1 Administrasi Publik

Sondang P.Siagian dalam Oktorandesta (2018) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang disepakati dan dilakukan oleh dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan. Kolaborasi *stakeholders* merupakan bagian perwujudan dari *good governance* khususnya pada paradigma keenam yaitu paradigma terbaru yang melibatkan peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

2.2 Manajemen Publik

Berdasarkan Woodrow Wilson (dalam Abdul 2014), secara khusus manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi pemerintah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi.
2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama.
3. Prinsip manajemen sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi
4. Metode perbandingan sebagai metode pengembangan bidang administrasi publik.

2.3 Kolaborasi Stakeholders

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung. (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014).

Chris Ansell dan Alison Gash Ansell dan Gash menjelaskan proses kolaborasi melalui komponen-komponen berikut :

1. Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)

Dialog antar-muka merupakan bentuk komunikasi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kolaborasi, sebab terdapat proses pembentukan konsensus.

2. Membangun Kepercayaan

Membentuk kepercayaan adalah syarat yang dibutuhkan untuk membentuk kolaborasi yang kuat.

3. Komitmen

Komitmen berhubungan erat dengan motivasi murni dari para *stakeholders* dalam kolaborasi.

4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama ini merupakan proses penyatuan pemikiran dan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman yang terjadi antar *stakeholders*.

5. Dampak Sementara

Dampak sementara merupakan bentuk hasil selama proses kolaborasi berlangsung, maka dari itu tersemat kata “sementara”. Dampak sementara menghasilkan umpan balik.

Stakeholders dibagi menjadi 3 kelompok (Maryono et al. 2005) dalam penelitian Fitri (2017), antara lain:

a. *Stakeholders* primer

Stakeholders primer adalah *stakeholders* yang menjadi pihak yang terdampak langsung dan terkait langsung dalam setiap program kolaborasi.

b. *Stakeholders* kunci

Pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam proses pengambilan keputusan.

c. *Stakeholders* sekunder

Stakeholders yang tidak mempunyai keterkaitan peran secara langsung terhadap rencana yang dibuat namun mempunyai kepedulian yang tergolong besar dalam proses pengembangan.

2.4 Pemberdayaan

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial (Zubaedi dalam Djamaludin 2017).

Teori tentang tahap pemberdayaan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam Fitri (2019) meliputi :

1. Tahap Penyadaran

2. Tahap Pengkapasitasan

3. Tahap Pendayaan

2.5 Desa Wisata

Priasukmana & Mulyadin (2016) memberikan definisi mengenai Desa Wisata yakni sebuah kawasan pedesaan yang menawarkan daya tarik dari keseluruhan suasana di lingkungan desa untuk mencerminkan bahwa kawasan pedesaan memiliki nilai yang baik.

2.6 Perilaku Organisasi

Robbins and Judge memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi.

C. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan *subjek menggunakan teknik purposive sampling* validitas data menggunakan teknik triangulasi data.

D. PEMBAHASAN

4.1 Proses Kolaborasi *Stakeholders*

O'leary, et al. Dalam Nikoyan (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi adalah proses memfasilitasi dan mengoperasikan pengaturan multiorganisasional untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dilakukan atau tidak mudah dipecahkan oleh organisasi tunggal.

Kolaborasi stakeholders dilakukan dalam pemberdayaan dengan melihat dari tiga tahapannya yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan. (Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam Fitri, 2019).

Analisis proses kolaborasi stakeholders di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo selanjutnya dijelaskan berdasarkan komponen-komponen proses kolaborasi meliputi pemahaman bersama, komitmen, komunikasi, dan dampak sementara. Stakeholders yang berperan dalam kolaborasi ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Stakeholders Primer : *Stakeholders* primer dalam kolaborasi di Pantai Karang Jahe ini yaitu masyarakat Desa Punjulharjo.
2. *Stakeholders* Kunci :

Alur kolaborasi stakeholders digambarkan dalam bagan sebagai

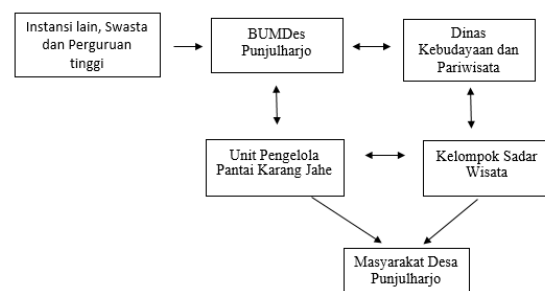
berikut : *Stakeholders* kunci dalam kolaborasi stakeholders di Pantai Karang Jahe ini yaitu BUMDes Punjulharjo, Unit Pengelola Pantai Karang Jahe, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kelompok Sadar Wisata.

3. *Stakeholders* Sekunder/Pendukung : *Stakeholders* sekunder/pendukung dalam kolaborasi di Pantai Karang Jahe ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bank Swasta, TNI dan POLRI, dan Perguruan Tinggi.

1. Dialog Antar-Muka

Awal kolaborasi dimulai dengan adanya dialog antar-muka dalam tahap penyadaran dan pengkapasitasan untuk membahas mengenai perencanaan program beserta

Gambar 3.5
Bagan Alur Kolaborasi *Stakeholders* dalam Pemberdayaan



Sumber : Hasil olah data peneliti, 2021

pembagian perannya. Berikut disajikan bagan alur kolaborasi:

Berdasarkan Gambar 3.5 mengenai alur proses kolaborasi menjelaskan bahwa garis koordinasi yang memiliki umpan balik meliputi BUMDes Punjulharjo sebagai pemilik unit usaha Pantai Karang Jahe diberikan pembinaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang kemudian BUMDes melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengambilan keputusan terkait pemberdayaan di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo.

BUMDes Punjulharjo memberikan tanggung jawab kepada Unit Pengelola untuk mengelola keseluruhan kegiatan wisata di Pantai Karang Jahe dan hasil wisata diserahkan ke BUMDes untuk dikelola. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata kemudian Kelompok Sadar Wisata memberikan kesadaran wisata kepada masyarakat sesuai arahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Unit Pengelola melibatkan Kelompok Sadar Wisata untuk bekerja di Pantai Karang Jahe kemudian Kelompok Sadar Wisata membantu membangun kesadaran wisata masyarakat. Intansi lain, swasta, dan Perguruan Tinggi memberikan bantuan berupa pembinaan maupun bantuan

fasilitas tanpa adanya timbal balik dan tidak berkelanjutan. Keseluruhan peran *stakeholders* dilakukan untuk membangun program untuk memberdayakan masyarakat Desa Punjulharjo.

Dalam proses ini terwujud keberhasilan pembangunan desa wisata terkait peran sumber daya manusia yang menunjukkan kualitas sumber daya yang baik dan pelibatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan sumber daya manusia dalam kolaborasi.

2. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan antar *stakeholders* dengan cara memberikan kepercayaan dan dukungan kepada BUMDes Punjulharjo untuk menjalankan perannya dalam kolaborasi dengan membuat konsep program pemberdayaan kemudian memberikan kepercayaan kepada Unit Pengelola untuk merealisasikan konsep program tersebut, disini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan untuk memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan konsep hingga pelaksanaannya. Kepercayaan dalam proses kolaborasi ini mengalami kendala berupa realisasi konsep dari BUMDes yang dilakukan oleh Unit Pengelola Pantai Karang Jahe karena pemahaman konsep tidak berhasil.

Kepercayaan merupakan tahap pengkapasitasan karena BUMDes dan Unit Pengelola Pantai membutuhkan fasilitasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait realisasi konsep yang dibuat oleh BUMDes.

3. Komitmen

Ansell dan Gash mendefinisikan komitmen dalam kolaborasi sebagai proses yang berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Komitmen para stakeholders dijelaskan melalui pembentukan komitmen itu sendiri dan kepercayaan antar stakeholders.

Pembentukan komitmen dilakukan oleh BUMDes dengan melakukan peran seoptimal mungkin, memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan Pantai Karang Jahe, dan mengelola dana hasil wisata dengan mengalokasikannya sesuai Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pembagian hasil wisata meliputi desa : 30%, pembangunan : 30%, operasional : 20%, pelatihan dan study banding : 5%, promosi : 5%, sosial : 5%.

Pembentukan komitmen oleh Unit Pengelola Pantai Karang Jahe yaitu dengan mengelola Pantai Karang Jahe menjadi tempat wisata nomor 1 di Rembang dengan memaksimalkan

peran dari setiap seksi di struktur organisasinya yang meliputi seksi penataan wahana, seksi keamanan, seksi penataan warung, seksi kebersihan, seksi sarana dan prasarana.

Pembentukan komitmen dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat kolaborasi *stakeholders* ini maju dan dikenal banyak orang dengan mengoptimalkan peran masing-masing, dalam pelaksanaan peran ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan pembinaan kepada *stakeholders* yang terlibat, instansi ini juga berkomitmen agar Pantai Karang Jahe dapat memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa tersebut sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan desa tersebut.

Pembentukan komitmen yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata yaitu membangun kesadaran masyarakat terhadap unsur-unsur Sapta Pesona yang meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Komitmen stakeholders termasuk dalam tahap pendayaan karena stakeholders kunci memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan diri melalui pemberdayaan yang sedang dilakukan. Dalam komitmen ini terwujud keberhasilan desa wisata berupa kegiatan pemerintah desa yang membuat

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan obyek wisata Pantai Karang Jahe sebagai bentuk fokus desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dalam kolaborasi ini diawali dengan adanya perbedaan kepentingan yang mendorong adanya evaluasi. Perbedaan kepentingan terjadi ketika belum saling memahami karakteristik masing-masing *stakeholders* sehingga menyebabkan beberapa *stakeholders* mendominasi peran *stakeholders* lainnya seperti Unit Pengelola Pantai Karang Jahe mendominasi dalam memberdayakan masyarakat di Pantai Karang Jahe sehingga peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kurang optimal. Penyelesaian perbedaan kepentingan ini dilakukan melalui proses evaluasi yang dilakukan rutin setiap bulan maupun satu tahun sekali dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders*. Pemahaman bersama merupakan tahap pengkapasitasan dimana dilakukan proses evaluasi antar *stakeholders* untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan.

5. Dampak Sementara

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa dampak sementara merupakan

dampak yang timbul dalam proses kolaborasi *stakeholders*. Dampak sementara dari kolaborasi *stakeholders* di Desa Punjulharjo meliputi peningkatan eksistensi Desa Wisata Punjulharjo karena berhasil meraih SK Desa Wisata, selain itu peningkatan pelayanan kepariwisataan sebagai bentuk keseriusan para *stakeholders* yang terlibat untuk mengembangkan Pantai Karang Jahe.

Dampak sementara termasuk dalam pendayaan, dengan menjadi juara 5 Lomba Desa Wisata Nusantara membuat Pantai Karang Jahe mendapat dana sebesar 400 juta untuk mengembangkan Pantai Karang Jahe. Dampak sementara termasuk tahap pendayaan dimana dengan mendapatkannya bantuan dana maka dapat dilakukan pembangunan dalam mendukung pemberdayaan kepada masyarakat.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan kolaborasi *stakeholders* dalam memberdayakan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi kolaborasi *stakeholders* di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo dalam memberdayakan masyarakat ditemukan faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dalam kolaborasi *stakeholders* di Pantai Karang Jahe dikategorikan baik, hal ini karena masing-masing *stakeholders* memiliki komitmen yang kuat terhadap hasil dari kolaborasi yang dilakukan sehingga peran yang dilakukan dalam optimal dalam memberdayakan masyarakat hingga mampu meraih juara 5 lomba desa wisata nusantara.

b. Keuangan Hasil Wisata

Hasil wisata menjadi faktor pendorong karena mampu dimanfaatkan untuk membiayai proses kolaborasi dalam memberdayakan masyarakat. Hasil wisata juga mampu membiayai sebagian besar pembangunan di Pantai Karang Jahe dan mampu meningkatkan masyarakat dengan pengalokasian dana sesuai Perdes Nomor 7 Tahun 2017.

c. Dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang

Bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Rembang seperti pemberian SK Desa Wisata kepada Desa Punjulharjo sehingga desa wisata ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi, dan di Kabupaten

Rembang hanya Desa Punjulharjo yang mendapatkan SK Bupati tersebut.

2. Faktor Penghambat

a. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan terjadi antar *stakeholders* yang berkolaborasi. Salah satu perbedaan kepentingan yang hingga saat ini berkaitan dengan pentingnya investor untuk Pantai Karang Jahe. Unit Pengelola tidak mengizinkan adanya investor sedangkan BUMDes dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memandang investor mampu memberi kemajuan yang signifikan bagi Pantai Karang Jahe, hal ini juga berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang dianggap masih kuno.

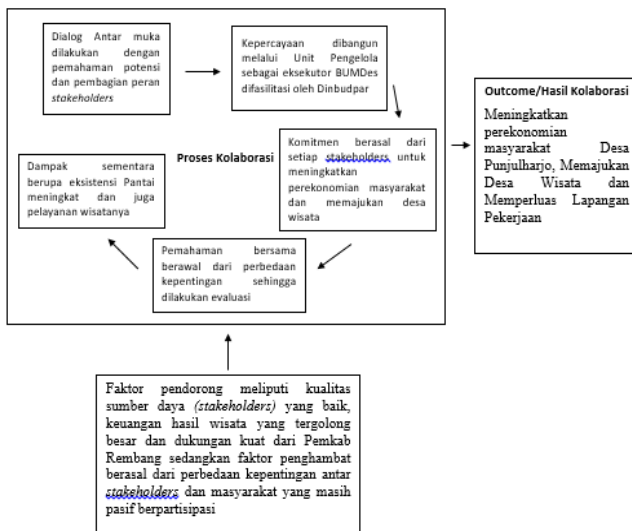
b. Masyarakat Pasif

Masyarakat menganggap bahwa pemberdayaan hanya tugas Unit Pengelola, BUMDes dan instansi terkait sehingga partisipasi mereka cukup rendah dalam menaati setiap peraturan yang dibuat oleh BUMDes, dalam keberlanjutan pemberdayaan maupun dalam memberikan aspirasi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Gambar 4.1
Bagan Proses Kolaborasi *Stakeholders* di Pantai Karang Jahe



Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2021

Proses kolaborasi *stakeholders* dalam pemberdayaan di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang sebagai berikut :

Proses kolaborasi *stakeholders* berlangsung melalui proses yang diawali dengan dialog antar-muka yang dilakukan dengan melakukan pertemuan antar *stakeholders*, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kondisi dari potensi Pantai Karang Jahe, pembuatan program pemberdayaan oleh para *stakeholders* sekaligus pembagian peran.

Proses selanjutnya yaitu proses membangun kepercayaan antar stakeholder, pembangunan kepercayaan antar *stakeholders* dilakukan dengan memahami peran masing-masing bahwa BUMDes sebagai konseptor pemberdayaan harus mampu membuat program pemberdayaan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepercayaan antar *stakeholders* membangun komitmen mereka dalam kolaborasi dimana BUMDes berkomitmen untuk memberikan BPJS ketenagakerjaan untuk para karyawan dan mengalokasikan dana sesuai Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017.

Beberapa proses dilalui yang didalamnya terdapat perbedaan kepentingan antar *stakeholders*, perbedaan kepentingan ini membawa *stakeholders* untuk melakukan proses evaluasi terhadap program yang dilaksanakan maupun terkait peran. Keseluruhan proses kolaborasi dilakukan dengan hasil berupa eksistensi Pantai Karang Jahe karena mendapat juara 5 Lomba Desa Nusantara dan SK Desa Wisata.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat

a. Faktor Pendorong

- Kualitas Sumber Daya Manusia
- Keuangan Hasil Wisata
- Dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang

b. Faktor Penghambat

- Perbedaan Kepentingan
- Masyarakat Pasif

2. Saran/ Rekomendasi

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap kolaborasi stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang adalah :

1. Untuk meningkatkan keberhasilan kolaborasi maka diperlukan keterbukaan informasi antara *stakeholders* yang terlibat dengan cara mengadakan pertemuan rutin dua minggu sekali dan dihadiri oleh seluruh *stakeholders* termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar semua *stakeholders* mengetahui seberapa jauh proses kolaborasi dilakukan.
2. Perlunya pendekatan yang lebih intens terhadap masyarakat untuk membangun kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan dengan cara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membentuk sebuah kelompok yang khusus berperan dalam membangun partisipasi masyarakat.
3. Perlu adanya investor untuk Pantai Karang Jahe seperti pembangunan homestay maupun hotel karena dengan adanya investor maka perkembangan Pantai Karang Jahe akan lebih pesat.
4. Perlu adanya pemberdayaan berkelanjutan dari stakeholders pendukung bagi masyarakat di Pantai Karang Jahe seperti Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan , serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu. Yogyakarta: Gavamedia.
- Arviana. (2018). Model Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara
- Djamaludin. (2017). Kolaborasi Multi Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan berbasis Undang[Tesis].Universitas Hasanuddin.
- Mia. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata.Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara
- Ni'mah. 2019. Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang

Air Peninggalan Kolonial
Belanda Di Kelurahan
Pajaresuk Kabupaten
Pringsewu. Jurnal Ilmu
Administrasi Publik ; Page: 55-
71

tahun-2019/ diunduh pada 19
Maret 2020
rembangkab.bps.go.id

Nuari, Bagus dkk.2017. Collaborative
Governance Dalam Program
Pengembangan Nilai Budaya
Daerah Melalui Banyuwangi
Ethno Carnival. Jurnal E-
SOSPOL; Vol. IV Edisi 1; hal 50
– 55

Ridho, Saikha. 2017. Model
Stakeholder Collaborative
Governance Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kampung
Hijau Gambiran Umbulharjo
Yogyakarta. Jurnal Kesehatan
Pemerintahan FISIPOL UMY
hlm 96-106

Rizka C., dan Herbasuki N. (2018).
Kolaborasi Stakeholders dalam
Pemberdayaan
Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik.

Oca. 2019. Wisata Bahari Karangjahe
Raih Posisi 5 Besar Lomba Desa
Wisata Nusantara Tahun 2019.
Dalam [https://suaraindonesia-
news.com/wisata-bahari-
karangjahe-raih-posisi-5-besar-
lomba-desa-wisata-nusantara-](https://suaraindonesia-news.com/wisata-bahari-karangjahe-raih-posisi-5-besar-lomba-desa-wisata-nusantara-)